

# PROSPEK PEMERINTAHAN MAYORITAS ZIMBABWE PIMPINAN ROBERT MUGABE

Oct. Ovy NDOUK\*

## PENDAHULUAN

Dalam pemilihan umum yang diadakan di Zimbabwe (sebelumnya Rhodesia) tanggal 27-29 Pebruari 1980, partai ZANU (Zimbabwe African National Union) pimpinan Robert Mugabe berhasil memenangkan 57 kursi (63%) dari 80 kursi parlemen (House of Assembly) yang dipertarungkan, dan yang disediakan bagi golongan kulit hitam. Ini berarti suatu kemenangan mutlak. Rekan seperjuangannya dalam perang gerilya yang berlangsung selama tujuh tahun, Joshua Nkomo, yang memimpin Partai ZAPU (Zimbabwe African People Union), memenangkan 20 kursi, dan Partai UANC (United African National Council) yang dipimpin bekas PM Uskup Abel Muzorewa hanya memperoleh 3 kursi.

Jumlah partai yang ikut dalam pemilihan ini seluruhnya terdiri dari sembilan partai, namun yang merupakan kontestan utama adalah ketiga partai tersebut di atas, dan kenyataannya hanya ketiga partai itu yang memperoleh kursi parlemen. Sementara 20 kursi lainnya yang dijatahkan bagi golongan minoritas kulit putih (dari kursi parlemen yang seluruhnya berjumlah 100) seluruhnya dimenangkan oleh partai Front Rhodesia yang dipimpin bekas PM Ian Smith, yang pemilihannya telah dilaksanakan sebelumnya pada tanggal 14 Pebruari 1980. Adanya jatah bagi golongan minoritas kulit putih ini adalah sesuai dengan ketentuan yang telah dicapai dalam persetujuan di Wisma Lancaster, London, pada bulan Desember 1979, yang antara lain memberikan jaminan kepada minoritas kulit putih untuk menguasai 20 dari 100 kursi di parlemen, selama sedikitnya 7 tahun.

Hasil pemilihan umum yang diikuti oleh 93% dari sekitar 2,9 juta pendu-

---

\* Staf CSIS

duk yang berhak memilih, tampaknya merupakan pola sejarah yang terjadi di negara yang berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Walaupun dalam kenyataannya tidak terdapat kerja sama yang baik antara dua sayap Front Patriotik yang terpecah yakni ZANU-pimpinan Mugabe, dan ZAPU-pimpinan Joshua Nkomo, mereka mempunyai tujuan yang sama. Dengan pemilihan umum ini maka lahirlah suatu negara Zimbabwe yang merdeka, bebas dari jajahan Inggris maupun dari rezim rasialis Ian Smith. Proses menuju kemerdekaan ini merupakan sesuatu yang unik, karena biasanya pemilihan umum dilakukan setelah suatu negara merdeka. Tetapi di Zimbabwe justru pemilihan umum sekaligus merupakan kemerdekaan nasional.

Dengan kemenangannya dalam pemilihan umum ini, Robert Mugabe telah terpilih menjadi perdana menteri baru Zimbabwe, dan sekaligus merupakan harapan bahwa hasil pemilihan umum itu merupakan titik awal masa damai di negara itu. Harapan ini diperkuat lagi dengan pernyataan dan tindakan Mugabe sendiri yang telah mengikutsertakan tokoh-tokoh kulit putih di dalam pemerintahannya yang baru, yang digambarkannya sebagai pemerintahan persatuan nasional. Kabinet yang diumumkan Mugabe telah mencerminkan apa yang telah diutarakannya dengan mengajak tokoh gerakan nasional Zimbabwe lainnya, Joshua Nkomo, dari Partai ZAPU, untuk ikut dalam pemerintahannya sebagai Menteri Dalam Negeri. Penduduk minoritas kulit putih juga diikutsertakan. Dua orang menteri kulit putih disertai tugas untuk memimpin Departemen Pertanian dan Departemen Perdagangan dan Industri.

Namun keberhasilannya dalam pemilihan yang mengantarkan Mugabe sebagai pemimpin Zimbabwe merdeka, sebenarnya juga merupakan awal dari suatu babak baru dalam sejarah negara Afrika itu, di mana Mugabe dihadapkan dengan berbagai masalah yang harus diatasinya dalam rangka menciptakan perdamaian dan persatuan nasional.

Dengan pengantar ini, penulis mencoba untuk membahas prospek dari pemerintahan mayoritas Zimbabwe pimpinan Robert Mugabe yang semula dikatakan sebagai seorang Marxis, namun kemudian mengubah kepribadian politiknya untuk bersikap lebih moderat dan pragmatis. Sebelumnya penulis akan mencoba untuk meninjau kembali secara singkat latar belakang historis Zimbabwe-Rhodesia sampai akhirnya memperoleh kemerdekaan.

## PROFIL SINGKAT ZIMBABWE-RHODESIA

Kekuasaan orang kulit putih yang telah memegang tampuk pemerintahan selama kurang lebih sembilan dasawarsa di Rhodesia secara resmi berakhir

tanggal 17 April 1980 tengah malam. Upacara penurunan bendera "Union Jack" (bendera Inggris) di Salisbury, yang digantikan dengan bendera Zimbabwe, menandai berakhirnya perang gerilya yang berlangsung selama tujuh tahun terakhir. Peristiwa yang bersejarah itu mengantarkan dan melahirkan suatu negara merdeka baru yang bernama Zimbabwe dengan ibukota Harare, yang sebelumnya bernama Salisbury. Peristiwa tersebut juga merupakan pengunduran diri terakhir kekuasaan Inggris dari Benua Afrika, di mana Gubernur Inggris Lord Christopher Soames menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Perdana Menteri baru Zimbabwe, Robert Mugabe, yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu pemimpin gerilyawan pejuang nasional yang tergabung dalam Front Patriotik.

Zimbabwe, yang sebelumnya lebih dikenal dengan nama Rhodesia (Selatan), pertama kali diduduki oleh pemukim-pemukim kulit putih yang datang dari daerah selatan pada tahun 1890. Dua tahun kemudian Cecil John Rhodes, seorang kolonialis Inggris terkemuka, mengirimkan sejumlah orang kulit putih untuk tinggal di sana, sebagai bagian dari rencana Pemerintah Inggris yang bercita-cita untuk menyatukan wilayah-wilayah Afrika yang membentang dari selatan ke utara, dari Tanjung Harapan sampai ke Kairo. Negeri itu kemudian dinamakan Rhodesia, dan selanjutnya menjadi koloni Inggris yang mempunyai pemerintahan sendiri pada tahun 1923.<sup>1</sup>

Tahun 1953, Inggris membentuk Federasi Rhodesia dengan Nyasaland yang terdiri atas Rhodesia (Selatan), Rhodesia (Utara) dan Nyasaland, dalam suatu pemerintahan yang disebut Federasi Afrika Tengah (Central African Federation - CAF). Orang-orang Afrika kulit hitam tidak menghendaki federasi ini, karena dengan demikian pengawasan politik berada ditangan orang kulit putih. Oleh karena itu selama puluhan tahun, perkembangan politik di Rhodesia ditandai oleh politik rasialisme. Tahun 1963, federasi itu dibubarkan, dan setahun kemudian Rhodesia Utara dan Nyasaland menjadi negara merdeka tersendiri dengan nama Zambia dan Malawi, sedang Rhodesia Selatan menghilangkan kata "Selatan", dan mulai menuntut kedaulatan mutlak. Sementara itu, berdasarkan Konstitusi Rhodesia Selatan tahun 1961, golongan minoritas kulit putih masih terus memegang kekuasaan pemerintahan, meskipun Pemerintah Inggris mengusulkan agar diadakan perubahan dalam konstitusi negara itu yang memungkinkan orang kulit hitam mendapat kedudukan yang lebih tinggi dalam pemerintahan. Mereka menentang usul Inggris tersebut, dan bahkan pada tanggal 11 Nopember 1965, pemerintah minoritas kulit putih yang dipimpin Perdana Menteri Ian D. Smith, mengumumkan kemerdekaan sepihak Rhodesia yang melepaskan diri dari pemerintahan Inggris. Akan tetapi Pemerintah Inggris menolak

1 Lihat *Suara Karya*, 21 April 1980. Lihat juga Klaus Freiherr von der Ropp, "Zimbabwe-A Chance with Robert Mugabe", *Aussen Politik*, vol. 31, 2/80

mengakui kemerdekaan sepihak itu, dan menyatakan bahwa penduduk Afrika yang mayoritas harus diwakili di dalam parlemen dan harus dirintis jalan bagi pemerintahan mayoritas kulit hitam secara murni. Dan sebagai akibatnya, sejumlah besar negara dan juga Dewan Keamanan PBB (tahun 1966) memutuskan untuk memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rhodesia, termasuk larangan penjualan minyak. Meskipun demikian, negara itu dapat membangun perekonomian dan kekuatan militernya secara mengagumkan. Hal ini juga merupakan sebab utama mengapa usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa Rhodesia mengalami kegagalan.<sup>1</sup>

Tahun 1969, pemerintah minoritas kulit putih Rhodesia memberlakukan konstitusi baru dan kemudian membentuk Republik Rhodesia pada 2 Maret 1970. Pada bulan Nopember 1971, Pemerintah Inggris dan Rhodesia mencapai persetujuan mengenai usul penyelesaian sengketa (kemerdekaan) Rhodesia,<sup>2</sup> namun setahun kemudian persetujuan itu dilanggar karena meluasnya tantangan dari rakyat Afrika hitam, yang mulai melancarkan perang gerilya untuk menggulingkan pemerintah minoritas kulit putih.

## PROSES MENUJU KEMERDEKAAN

Sejak tahun 1972, gerilyawan pejuang nasionalis (Front Patriotik) pimpinan Joshua Nkomo dan Robert Mugabe, melancarkan kegiatannya menentang pemerintah minoritas kulit putih, dari sepanjang perbatasan negara tetangganya Zambia dan Mozambik.

Setelah suatu komisi yang dipimpin oleh Lord Pearce, yang ditunjuk oleh Pemerintah Inggris untuk meneliti pendapat semua golongan di Rhodesia mengenai usul-usul penyelesaian yang telah disetujui oleh Pemerintah Inggris dan Rhodesia, memperoleh kenyataan bahwa usul-usul itu tidak dapat diterima oleh orang-orang Rhodesia kulit hitam,<sup>3</sup> Pemerintah Inggris tidak melakukan usaha lebih lanjut untuk mencapai penyelesaian bilateral dengan Pemerintah Rhodesia. Inggris mendesak Pemerintah Rhodesia agar melakukan perundingan di antara mereka sendiri (secara intern) guna mencapai suatu penyelesaian sengketa, sebelum Pemerintah Inggris ikut mengambil bagian lagi dalam perundingan.<sup>4</sup>

---

1 *Ibid.*

2 Lihat *Africa South of the Sahara 1979-1980*, hal. 1158

3 *Ibid.*

4 Lihat Martyn Gregory, "The 1980 Rhodesian Election-A First-Hand Account and Analysis", *The World To Day*, Mei 1980

Jatuhnya pemerintah kolonial Portugis di Mozambik tahun 1974 telah mempengaruhi kaum gerilya Front Patriotik Rhodesia meningkatkan kegiatannya dalam usaha memaksa rezim minoritas kulit putih Ian Smith untuk menyerahkan kekuasaannya. Kenyataan ini merupakan peringatan bagi rezim minoritas kulit putih yang berkuasa. Tampaknya mereka juga sadar bahwa kebijaksanaan mereka untuk tetap berkuasa di negara itu tidak akan dapat terus dipertahankan untuk jangka waktu yang lama. Hal ini juga disadari oleh beberapa negara Barat yang memang merasa cemas dengan perkembangan yang terjadi di Rhodesia. Sebenarnya kecemasan negara-negara Barat itu terutama di dasarkan pada kenyataan bahwa seandainya penyelesaian masalah Rhodesia ditempuh dengan cara kekerasan, maka akhirnya kekuasaan orang kulit putih akan lenyap juga, dan akan digantikan oleh unsur-unsur radikal orang kulit hitam yang mungkin sekali akan bekerja sama dengan Uni Soviet. Dan dengan demikian pengaruh Uni Soviet akan semakin meluas di Benua Afrika.

Itulah sebabnya Amerika Serikat dan Inggris berusaha agar penyelesaian masalah Rhodesia ditempuh melalui jalan perundingan, walaupun pada hakekatnya mereka menyadari bahwa hasilnya akan sama juga, yakni terbentuknya pemerintah mayoritas kulit hitam, tetapi dengan perhitungan bahwa pemerintah mayoritas itu sedapat mungkin terdiri dari unsur-unsur yang lebih moderat.

Rencana perdamaian, yang disusun bersama oleh Inggris dan Amerika Serikat (Rencana Anglo - Amerika), pada akhir Agustus 1977 disampaikan oleh (bekas) Menlu Inggris Dr. David Owen dan (bekas) Duta Besar AS untuk PBB Andrew Young kepada pemimpin-pemimpin Afrika termasuk (bekas) PM Afrika Selatan, Voster, dan selanjutnya pada 1 September kepada pemimpin minoritas kulit putih Rhodesia PM Ian Smith, dengan desakan agar dipertimbangkan dan diterima. Rencana ini antara lain menyebutkan realisasi pemerintahan mayoritas kulit hitam dan suatu peralihan secara teratur dan damai selama 6 bulan, termasuk pemilihan umum (hak pilih umum bagi orang dewasa) atas dasar satu orang satu suara, pada akhir masa peralihan itu untuk memilih suatu pemerintah yang akan mengambil alih kekuasaan pemerintahan. Akan tetapi PM Ian Smith, yang saat itu memimpin pemerintahan minoritas kulit putih, menolak usul-usul rencana penyelesaian Anglo - Amerika itu, dan bahkan mengajukan rencananya sendiri. Rencana itu disebutnya sebagai "penyelesaian intern" Rhodesia, dengan pertimbangan bahwa masalah Rhodesia adalah masalah yang merupakan urusan rakyat Rhodesia sendiri, dan oleh karenanya harus diselesaikan oleh rakyat Rhodesia sendiri, tanpa campur tangan asing. Rencana ini juga antara lain berkisar pada pembentukan pemerintahan mayoritas melalui pemilihan umum, tetapi hak pilih terbatas pada mereka yang memenuhi syarat yang terlalu berat bagi kebanyakan

penduduk kulit hitam. Selain itu rencana ini juga terlalu banyak memberikan jaminan konstitusional bagi hak-hak golongan minoritas kulit putih. Angkatan bersenjata Rhodesia akan dipertahankan dan menjadi angkatan bersenjata Zimbabwe, dan bersama-sama dengan angkatan kepolisian terlepas dari bidang politik. Front Patriotik dengan tegas ditolak karena PM Ian Smith khawatir bahwa Rhodesia akan dikuasai oleh golongan Marxis. Sebaliknya PM Ian Smith mengajak pemimpin-pemimpin moderat seperti Uskup Abel Muzorewa, Ndabaningi Sithole dan pengikut-pengikutnya untuk bekerja sama. Dengan demikian akan muncul pemerintahan mayoritas di bawah pemimpin-pemimpin moderat itu, yang diharapkan didukung oleh rakyat, dengan perhitungan bahwa tanpa dukungan rakyat, para gerilyawan tidak akan dapat bertahan lama. Dan selain itu, negara-negara Afrika, khususnya negara-negara tetangganya, lambat laun akan mengakui juga pemerintahan mayoritas itu.<sup>1</sup>

Rencana Anglo - Amerika akhirnya gagal dilaksanakan, meskipun didukung oleh beberapa negara Afrika seperti "negara-negara garis depan" Tanzania, Mozambik, Botswana, Angola dan Zambia, dan kemudian juga oleh Dewan Keamanan PBB, karena PM Ian Smith tetap berkeras untuk mempertahankan rencananya sendiri. Dan bahkan untuk memperkuat kedudukannya, ia mengadakan pemilihan umum pada 31 Agustus 1977, di mana partainya Front Rhodesia memperoleh kemenangan 55 dari 66 kursi parlemen.<sup>2</sup>

Sementara itu tantangan-tantangan terhadap pemerintahannya terus berlangsung. Dari dalam negerinya sendiri, Front Patriotik terus meningkatkan perang gerilyanya, sedang dari luar negeri, banyak negara yang mengecam kebijaksanaan Pemerintah Smith. Menyadari bahwa pemerintahannya tidak dapat terus dipertahankan, maka Ian Smith mengadakan pendekatan dengan kelompok moderat kulit hitam agar mau bekerja sama. Setelah mengadakan perundingan, akhirnya mereka mencapai kata sepakat. Tanggal 3 Maret 1978, PM Ian Smith dan para pemimpin moderat kulit hitam yang terdiri atas Uskup Abel Muzorewa, Pendeta Ndabaningi Sithole dan Senator Jeremiah Chirau, menandatangani suatu persetujuan bersejarah yang membuka jalan bagi pemilihan umum nasional dan berakhirnya pemerintahan minoritas kulit putih. Persetujuan ini yang disebut sebagai "Persetujuan Penyelesaian Intern" Rhodesia, merupakan persetujuan konstitusional, yang antara lain menyebutkan bahwa Rhodesia akan diserahkan secara resmi kepada pemerintah mayoritas kulit hitam pada atau sebelum tanggal 31 Desember 1978, segera setelah konstitusi terbentuk, yang kemudian dilanjutkan dengan pemilihan umum. Dalam masa peralihan, Rhodesia dipimpin oleh Dewan Eksekutif

1 Lihat Kirdi Dipoyudo , "Antara Dua Rencana Perdamaian Rhodesia", *Suara Karya*, 5 Oktober 1977

2 Lihat *Indonesia dan Dunia Internasional 1978*, CSIS. Lihat juga *Africa Guide 1980*

yang terdiri atas pada penandatanganan persetujuan itu, yang secara bergiliran mengetuai Dewan Eksekutif tersebut.<sup>1</sup> Persetujuan ini dikecam oleh para pemimpin gerilya yang tidak diikutsertakan.

Setelah mengalami penundaan, pemilihan umum atas dasar satu orang satu suara dilaksanakan juga pada bulan April 1979 dan dimenangkan oleh Uskup Abel Muzorewa, yang kemudian menjadi perdana menteri kulit hitam pertama negara itu. Akan tetapi ia tidak mendapatkan pengakuan internasional, dan bahkan oleh Dewan Keamanan PBB Pemilu dinyatakan tidak sah, karena para gerilyawan tidak diikutsertakan. Para pemimpin gerilya, Joshua Nkomo dan Robert Mugabe, yang masing-masing berpangkalan di Zambia dan Mozambik, menuduh Muzorewa sebagai pengkhianat dan bertekad meneruskan perjuangan untuk merebut kekuasaan menyeluruh bagi kulit hitam dan menggulingkan apa yang mereka namakan pemerintah "boneka" Muzorewa.

Sementara itu, pada pertemuan pemimpin-pemimpin pemerintahan negara-negara Persemakmuran (Commonwealth) yang berlangsung di Lusaka, Agustus 1979, Pemerintah Inggris menyetujui sembilan point yang menyangkut masalah Rhodesia demi terwujudnya suatu pemerintahan mayoritas kulit hitam. Hal ini dituangkan dalam komunike bersama sesuai pertemuan itu.<sup>2</sup>

Berawal dari pertemuan di Lusaka itu, Pemerintah Inggris mengundang semua pihak yang bersengketa di Rhodesia untuk menghadiri Konperensi Konstitusi mengenai Rhodesia. Dan untuk pertama kalinya selama sengketa berlangsung, semua pihak yang bersengketa di Rhodesia bersama-sama menghadiri suatu perundingan mengenai negaranya. Perundingan yang dipimpin oleh Menlu Inggris Lord Carrington itu dilaksanakan di Wisma Lancaster, London, dimulai 10 September 1979 dan berlangsung selama 15 pekan, dan akhirnya menghasilkan suatu persetujuan, setelah mengalami masa krisis terancam batal. Tanggal 12 Desember 1979, Rhodesia dinyatakan sebagai bagian dari Kerajaan Inggris. Tanggal ini merupakan hari berakhirnya kemerdekaan tidak sah Rhodesia yang diproklamasikan secara sepihak oleh Iar Smith tahun 1965. Sementara itu, Lord Soames, seorang diplomat Inggris ditunjuk sebagai Gubernur Inggris untuk Rhodesia, yang hanya akan mengatur dan menjalankan pemerintahan selama masa transisi sampai Pemilihan dan kemerdekaan penuh Rhodesia. Dan pada 21 Desember 1979, pemimpin pemimpin Front Patriotik, Joshua Nkomo dan Robert Mugabe, Uskup Abel Muzorewa, dan di pihak Inggris, Menlu Lord Carrington dan Wakilnya Ia Gilmour, menandatangani perjanjian perdamaian yang menandai berakhirnya

1 Lihat *Indonesia dan Dunia Internasional 1979*, CSIS

2 Lihat (Dokumen) Komunike Lusaka, *African Affairs*, vol. 79, no. 314, Januari 1980, hal. 1

pertumpahan darah di Rhodesia. Paket persetujuan itu antara lain meliputi gencatan senjata, yang mulai berlaku 28 Desember 1979, dan diawasi kurang lebih 1.300 pasukan monitor gencatan senjata Persemakmuran yang berisikan pasukan Inggris, Australia, Selandia Baru, Fiji dan Kenya; serangkaian peraturan masa peralihan menjelang Pemilu Pebruari 1980; konstitusi baru; dan pembentukan negara Zimbabwe-Rhodesia merdeka yang dikuasai oleh golongan mayoritas kulit hitam.<sup>1</sup>

Segera setelah ditandatanganinya persetujuan damai tersebut Dewan Keamanan PBB mengumumkan pencabutan sanksi-sanksi ekonomi terhadap Rhodesia (yang mulai berlaku 6 Nopember 1966) dan menyerukan pemberian bantuan segera untuk membangun kembali Rhodesia.<sup>2</sup> Sebelumnya Amerika Serikat dan Australia telah mencabut sanksi ekonominya terhadap Rhodesia, karena tujuan dari sanksi itu telah tercapai.<sup>3</sup> Dengan demikian tampak bahwa keberhasilan diplomatik Pemerintah Inggris yang menghasilkan persetujuan Wisma Lancaster itu disambut baik oleh masyarakat internasional. Oleh karena mengikutsertakan semua pihak yang bersengketa di Rhodesia, maka proses penyelesaian sengketa menuju kemerdekaan dengan pemerintahan mayoritas kulit hitam dapat terwujud. Dan dengan landasan ini terbentuklah suatu negara Zimbabwe merdeka dan berdaulat, di mana mayoritas kulit hitam akhirnya memegang kekuasaan untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan.

## MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI ZIMBABWE SETELAH MERDEKA

Tugas utama Robert Mugabe setelah berhasil menang dalam pemilihan umum dan kemudian menjadi Perdana Menteri baru Zimbabwe merdeka, adalah menggalang persatuan antara semua golongan dan bekerja sama bahu-membahu, tanpa rasa curiga, menuju suatu negara Zimbabwe merdeka yang maju.

Sebagai pemimpin dari suatu negara yang baru merdeka, Robert Mugabe menghadapi cukup banyak masalah sulit yang harus diatasinya. Hal ini antara lain karena Partai ZANU yang dipimpinnya belum begitu berpengalaman dalam menjalankan kendali pemerintahan, dan tampilnya pemerintahannya itu menyebabkan keluarnya orang-orang kulit putih (Rhodesia) dari negara itu yang dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan ekonomi.

1 Lihat *Kompas*, 12 dan 13 Desember 1979. Lihat juga Klaus Freiherr von der Ropp, "Zimbabwe-A Chance with Robert Mugabe", *Aussen Politik*, vol. 31, 2/80

2 Lihat *Antara*, 22 Desember 1979/B

3 Lihat *Antara*, 19 Desember 1979/A

Setelah hasil-hasil pemilihan umum diumumkan pada 4 Maret 1980, Robert Mugabe yang diminta oleh Gubernur Inggris, Lord Soames untuk membentuk pemerintahan Zimbabwe, membentangkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahannya, mulai dari nonblok dalam urusan luar negeri hingga rencana-rencana ekonomi yang moderat di dalam negeri. Ia menyatakan menyetujui nasionalisasi dengan ganti kerugian atas tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan atau tanah-tanah yang dikuasai tuan tanah yang bertempat tinggal di lain tempat, sehingga dapat dimulai program pembagian kembali tanah, sebagaimana telah dijanjikannya kepada para pendukungnya. Dia menerima landasan kapitalis bagi perekonomian negara dengan perubahan secara bertahap tanpa penyitaan harta benda pribadi atau nasionalisasi penuh. Mengenai pertahanan ia menyerukan bersatunya kekuatan-kekuatan yang bersaing menjadi suatu tentara Zimbabwe baru. Ia juga menyerukan kerukunan kembali dan akan berusaha menjamin rasa aman bagi setiap orang baik yang menang maupun yang kalah. Sedang mengenai urusan-urusan luar negeri ia menyatakan bahwa Zimbabwe akan menjadi negara nonblok dengan sahabat-sahabatnya di antara negara-negara NATO dan Pakta Warsawa. Zimbabwe akan menjadi anggota Persemakmuran, anggota Gerakan Non-Blok dan anggota PBB, dan akan hidup berdampingan secara damai dengan Afrika Selatan.<sup>1</sup>

Dari pandangan-pandangan yang telah dibentangkannya itu jelas bahwa Robert Mugabe telah mengisyaratkan suatu strategi nasional yang luas dari negaranya. Tampaknya ia menyadari bahwa tanggung jawab nasional dari masa depan kemerdekaan itu harus ditegakkan atas dasar persatuan nasional, tanpa membedakan golongan dan suku.

Oleh karena itu adalah sangat bijaksana bahwa Robert Mugabe pada tahap awal dari masa kemerdekaan negaranya mengajak rekan seperjuangan dan sekaligus juga saingannya, Joshua Nkomo, untuk berkoalisi, walaupun sebenarnya hal ini tidak perlu karena Mugabe mempunyai mayoritas mutlak dalam parlemen. Dari 23 kursi dalam kabinetnya, empat diberikan kepada fraksi Nkomo, termasuk jabatan Menteri Dalam Negeri yang dijabat oleh Joshua Nkomo sendiri yang juga membawai Dinas Kepolisian. Tampaknya dengan cara ini Mugabe berusaha untuk menyingkirkan perpecahan yang mungkin akan timbul di masa mendatang. Di lain pihak Mugabe juga mengikutsertakan golongan minoritas kulit putih yang sebelumnya merupakan musuhnya. Seperti kita lihat di atas, dua orang menteri kulit putih disertai tugas memimpin Departemen Pertanian dan Departemen Perdagangan dan Industri.

---

1 Lihat H.M.L. Beri, "A New Phase in Rhodesia", *Strategic Analysis*, vol. III, no. 12, Maret 1980. Lihat juga *Antara*, 5 Maret 1980

Dari susunan kabinetnya ini jelas tercermin apa yang digambarkan Mugabe sebagai pemerintahan persatuan nasional, oleh karena persatuan nasional itu merupakan landasan utama dari kemerdekaan yang telah dicapai. Dan dengan langkah pertamanya itu tampak bahwa Mugabe telah berhasil mempersatukan semua golongan, setidaknya-tidaknya pada tahap awal dari kemerdekaannya.

Untuk memelihara ketenteraman dan mungkin juga untuk menghilangkan rasa curiga kelompok minoritas kulit putih yang pada saat-saat terakhir menjelang kemerdekaan Zimbabwe mengancam akan meninggalkan negara itu, Mugabe memberikan jaminan bahwa semua hak mereka akan tetap diberikan. Pegawai Negeri yang sebagian terbesar adalah orang-orang kulit putih masih tetap diperlukan sebagaimana adanya dan berhak atas pensiun di hari tua. Malahan untuk lebih meyakinkan mereka, Mugabe juga mengumumkan bahwa Letnan Jenderal Peter Walls, panglima militer kulit putih, akan tetap memimpin tentara nasional Zimbabwe, yang antara lain mencakup kesatuan-kesatuan gerilya yang sebelumnya diperangi olehnya. Janji ini tampaknya dipenuhinya, namun di lain pihak partainya yang berkuasa dalam parlemen banyak membuat perubahan-perubahan di negara itu, termasuk menghapus hari libur tradisional orang kulit putih, berbagai pengadilan, serta pelayanan umum lainnya yang berorientasi ke Barat. Kenyataan ini menimbulkan keceemasan di kalangan minoritas kulit putih sehingga banyak di antaranya meninggalkan negara itu.

Eksodus orang kulit putih ini sebenarnya telah terjadi sejak Robert Mugabe terpilih sebagai Perdana Menteri Zimbabwe. Ribuan orang kulit putih meninggalkan negara itu selama tiga bulan pertama pemerintahan Mugabe. Pada mulanya kepergian orang-orang kulit putih ini sebenarnya hanya karena kekuatiran mereka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan mereka hadapi dalam masa pemerintahan Mugabe yang sebelumnya dikatakan sebagai seorang Marxis. Namun rupanya Mugabe menyadari kekuatiran mereka itu, sehingga jauh sebelumnya ia menyerukan persatuan nasional dan kerukunan antar golongan dalam suatu Zimbabwe yang merdeka. Ia memberikan jaminan bagi hak-hak orang kulit putih sambil menganjurkan ditempuhnya jalan campuran antara sosialisme dan kapitalisme dalam upaya untuk menahan perginya seperempat juta orang kulit putih yang mempunyai ketrampilan tertentu, dan yang diperlukannya dalam membangun negaranya, agar perekonomian yang bertumpu pada pertambangan dan pertanian tetap terpelihara. Di samping itu ia juga ingin memperbaiki posisi tujuh juta orang kulit hitam sebagaimana telah dijanjikannya sebelum pemilihan.

Tampaknya seruan persatuan nasional dan rekonsiliasi serta jaminan-jaminan yang diberikan Mugabe sedikit mengubah sikap golongan minoritas

kulit putih, untuk lebih baik menunggu sambil melihat perkembangan lebih lanjut. Namun keadaan ini tidak berlangsung lama, karena sejumlah besar orang kulit putih meninggalkan Zimbabwe. Pada bulan Juli 1980 saja sekitar 1.600 orang (sebagian besar kulit putih) meninggalkan negara itu menuju Afrika Selatan. Salah satu alasan kepergian mereka itu pada dasarnya hanya karena khawatir dengan masa depan mereka di bawah pemerintahan Robert Mugabe.<sup>1</sup> Di samping itu, mereka menyadari bahwa pemerintah baru lambat-laun akan menguasai seluruh struktur yang sebelumnya didominasi oleh orang-orang kulit putih, sehingga menghilangkan harapan-harapan orang kulit putih untuk hidup lebih baik daripada sebelumnya. Cara pemimpin-pemimpin baru berpidato "anti imperialis", yang disiarkan melalui TV dan radio, dan bahkan standar penggunaan sebutan "sahabat" untuk menyebut anggota-anggota parlemen kulit hitam, telah mencemaskan banyak orang kulit putih. Hal-hal seperti ini dan mungkin juga beberapa hal lain yang tidak menyenangkan dapat mengakibatkan kepergian orang-orang kulit putih. Mugabe mengetahui bahwa dalam waktu kira-kira lima tahun mendatang, karena satu dan lain hal, kemungkinan banyak orang kulit putih akan meninggalkan negara itu.<sup>2</sup>

Masalah ini kiranya masih terlalu sulit dipecahkan oleh Mugabe, setidaknya untuk sementara ini. Jaminan yang diberikan ternyata belum cukup untuk menahan kepergian orang-orang kulit putih itu. Namun jika keadaan ini terus berlanjut, akibatnya akan menyulitkan perekonomian negara itu. Dan kabarnya Zimbabwe memang sedang mengalami kesulitan tenaga trampil untuk mengisi kekosongan ratusan lapangan pekerjaan yang ditinggalkan oleh orang-orang kulit putih. Tenaga-tenaga yang ada tampaknya belum mampu menggantikan kedudukan mereka,<sup>3</sup> Oleh karena sebelumnya minoritas kulit putih mendominasi sektor-sektor penting dalam perekonomian negara itu. Mereka yang telah terbiasa menikmati hidup mewah memang terlalu sulit menerima kenyataan di negara yang baru merdeka itu. Salah satu faktor yang mungkin juga menyebabkan kepergian orang-orang kulit putih itu adalah perombakan sistem perpajakan yang lama oleh pemerintah baru. Pajak penjualan yang selama pemerintahan minoritas kulit putih mencapai 15% diturunkan menjadi 5%. Khusus untuk barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari, pajak penjualannya dihapuskan, sedang untuk barang-barang mewah termasuk tembakau, rokok dan minuman keras dinaikkan 5%. Sebaliknya pajak pendapatan dinaikkan 5%. Kebijakan ini disambut dengan rasa tidak puas oleh masyarakat minoritas kulit putih, karena mereka yang paling

---

1 Lihat *The Straits Times*, 23 September 1980

2 Lihat "Zimbabwe: Mugabe's Headaches", *Africa Confidential*, 4 Juni 1980

3 Lihat *Kompas*, 23 Juni 1980

terkena kebijaksanaan ini. Sebaliknya masyarakat kulit hitam menyambut baik karena mereka diuntungkan.<sup>1</sup>

Sementara masalah eksodus orang kulit putih ini belum terpecahkan, PM Robert Mugabe menghadapi masalah lain yang mungkin dapat dikatakan sebagai "benih perpecahan" dalam tubuh kabinet koalisinya. Hal ini diawali dengan timbulnya pemberontakan di wilayah Zimbabwe bagian tengah (Juni 1980) yang kemudian berhasil diatasi oleh angkatan bersenjata Zimbabwe baru. PM Robert Mugabe menuduh bahwa yang memberontak itu adalah bekas gerilya pimpinan Joshua Nkomo. Akan tetapi Joshua Nkomo membantah tuduhan itu dan sebaliknya menganggap pernyataan Mugabe itu sebagai suatu penghinaan terhadap dirinya. Ia menyatakan bahwa orang-orang dari partainya tidak pernah menghina partai pemerintah. Pemberontak adalah orang-orang yang disiksa oleh para gerilya ZANLA (Tentara Pembebasan Nasional Afrika Zimbabwe - sayap militer kelompok gerilya ZANU pimpinan Mugabe), dan penyiksaan itu masih terus berlangsung.<sup>2</sup> Keretakan juga mulai terbuka ketika PM Robert Mugabe kembali dari KTT Organisasi Persatuan Afrika dan Joshua Nkomo mengecamnya karena dia tidak diikutsertakan. Akan tetapi menurut para pengamat, kecaman Joshua Nkomo itu merupakan puncak dari ketidakpuasannya, karena selama menjalankan roda pemerintahan yang baru berjalan beberapa bulan itu partainya merasa hanya diberi peran kecil saja, dan keputusan-keputusan utama diambil oleh Komite Sentral partai Mugabe, dan bukannya oleh kabinet di mana duduk beberapa orang dari fraksi Nkomo.<sup>3</sup> Jika apa yang digambarkan oleh para pengamat tersebut benar, maka hal itu bisa berarti bahwa kabinet koalisi Mugabe hanya merupakan nama di atas kertas saja. Kehadiran fraksi Nkomo dalam kabinet tampaknya hanya merupakan sebagian dari sikap tenggang rasa Mugabe terhadap rekan sejuangnya dalam perang gerilya. Keinginan Nkomo untuk berbicara lebih banyak dalam percaturan politik di negara itu tampak sangat terbatas pada ruang lingkup yang kecil di tengah kekuasaan mayoritas partai Mugabe. Timbulnya rasa tidak puas ini mungkin dapat dikatakan telah berawal dari saat pembentukan kabinet. Sebelum pembentukan kabinet secara resmi diumumkan, telah tersiar berita bahwa Joshua Nkomo kemungkinan besar akan duduk sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet Mugabe, suatu jabatan penting nomor dua setelah Perdana Menteri. Dan adalah keinginan Nkomo untuk duduk sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet itu. Akan tetapi kenyataannya portofolio ini dirangkap oleh PM Mugabe, dan Nkomo disertai tugas untuk memimpin Departemen Dalam Negeri, yang juga membawahi Dinas Kepolisian. Tindakan Mugabe ini tampaknya dimaksudkan

---

1 Lihat, *Kompas*, 21 April 1980

2 Lihat *Kompas*, 30 Juni 1980

3 Lihat *Kompas*, 9 Juli 1980

agar secara bersama mereka dapat membina keamanan dan ketenteraman Zimbabwe merdeka. Dan jika kini muncul "ketidakpuasan" itu, maka ini bisa berarti bahwa benih perpecahan antara keduanya telah mulai ditaburkan. Jika hal ini terus berlanjut, bukan tak mungkin benih itu akan tumbuh menjadi bahaya yang mudah mendatangkan bencana. Dan sehubungan dengan adanya kemungkinan tersebut perlu dicatat, bahwa sebagian kaum gerilya pengikut Joshua Nkomo secara *de facto* telah diintegrasikan dalam tentara nasional Zimbabwe baru.

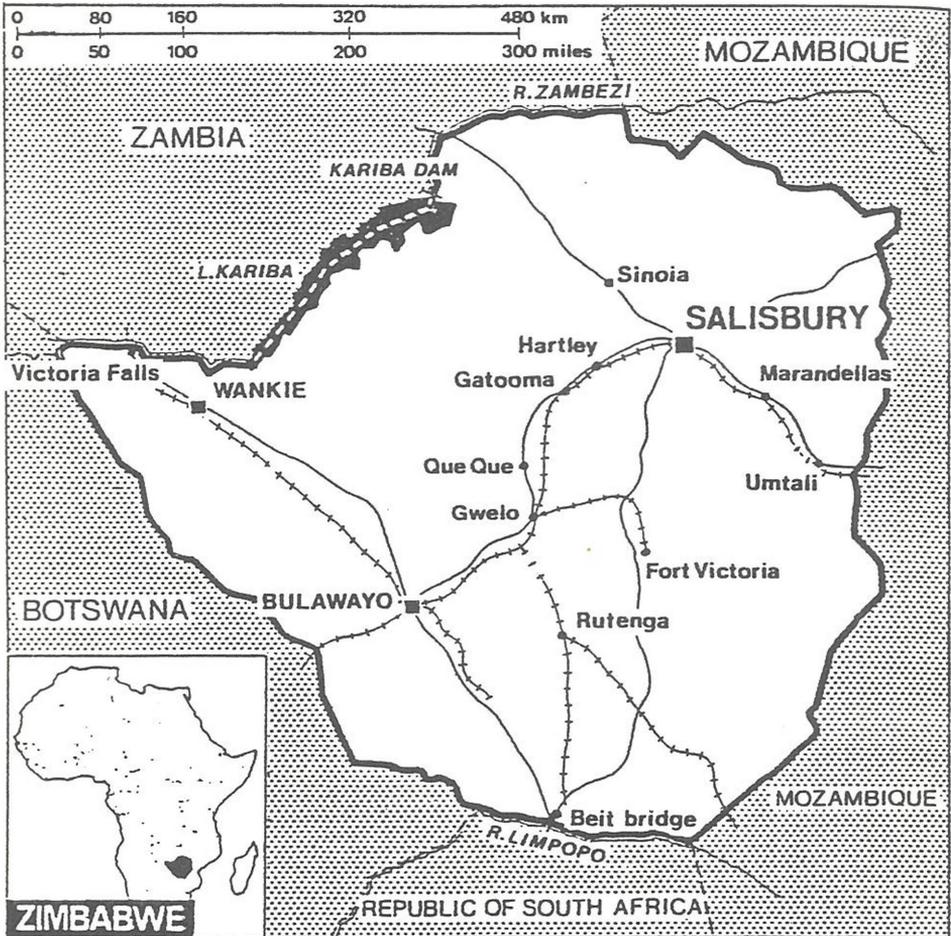
Unsur lain yang kiranya juga merupakan masalah yang mengganggu kelancaran pemerintahan mayoritas kulit hitam ini adalah penempatan kembali bekas gerilya dari kekuatan dua sayap Front Patriotik, yang jumlahnya mencapai sekitar 30.000 orang, dalam suatu komando tentara nasional Zimbabwe. Sebagian di antaranya telah diintegrasikan ke dalam tentara nasional, dan hal itu masih terus dilakukan, sedang sebagian lainnya diusahakan (secara sukarela?) agar kembali ke dalam masyarakat biasa dengan dibekali semacam imbalan tertentu (pesangon). Proses pengintegrasian gerilyawan-gerilyawan tampaknya berjalan cukup lancar, walaupun belum selesai dan masih merupakan beban bagi pemerintah. Yang mungkin perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Mugabe adalah bekas gerilya yang dikembalikan ke dalam masyarakat, oleh karena mereka ini mungkin saja dapat menimbulkan kesulitan bagi pemerintah pada masa mendatang. Pertama, mereka mungkin merasa tersisih dari rekan-rekan sepejuangan, dan kedua, jika lapangan pekerjaan tidak cukup atau tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan kemungkinan besar akan timbul rasa tidak puas. Dalam keadaan seperti ini mereka akan mudah terpengaruh dan menciptakan suatu keadaan yang bisa mendatangkan kesulitan bagi pemerintah.

Sementara itu Letnan Jenderal Peter Walls, yang semula diminta oleh Mugabe untuk tetap menduduki posisinya sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Zimbabwe, diusir oleh Pemerintah Mugabe. Pengusiran terjadi ketika ia (Walls) di Inggris. Ia dilarang kembali ke Zimbabwe karena pernyataannya bahwa ia pernah mencoba melakukan kudeta terhadap pemerintah resmi. Ian Smith yang baru terpilih kembali sebagai Ketua Partai Front Rhodesia (kulit putih) mengancam tindakan pengusiran Pemerintah Mugabe itu.<sup>1</sup> Sebegitu jauh belum ada penegasan resmi dari Pemerintah Mugabe tentang kebenaran berita ini. Namun jika berita itu benar, mungkin ini merupakan salah satu tindakan Mugabe untuk mulai mengurangi peranan orang kulit putih di Zimbabwe, terutama dalam tubuh angkatan bersenjata, untuk mencegah kemungkinan usaha kudeta.

---

1 Lihat *Kompas*, 30 September 1980

## ZIMBABWE



Diambil dari *Africa Guide 1980*

## KESIMPULAN

Perkembangan di Zimbabwe merupakan kejadian positif yang terjadi di tengah berbagai pergolakan di Benua Afrika. Dari perang yang meminta banyak korban ke perjanjian perdamaian lewat meja perundingan dan pemilihan umum yang melahirkan suatu negara Zimbabwe merdeka.

Langkah-langkah kebijaksanaan PM Robert Mugabe pada tahap awal dari kemerdekaan Zimbabwe jelas bertujuan untuk mengadakan konsolidasi ke dalam dengan mengurangi pihak yang berposisi dan merangkul sebanyak mungkin teman dan pendukung.

Pandangannya yang jauh ke depan telah mengubah sikap dan kepribadian politiknya. Sikap Mugabe yang semula militan, radikal dan Marxis (lebih berorientasi ke RRC daripada Uni Soviet), seperti para pemimpin di Angola dan Mozambik, berubah menjadi lebih moderat dan pragmatis, karena alasan taktis dan praktis. Ia menerima kenyataan Zimbabwe, dan sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas pemerintahan negara, ia memilih untuk bertindak lebih bijaksana daripada ketika masih dalam kedudukan sebagai oposisi. Sikap ini banyak didorong oleh pengalaman negara tetangganya seperti Mozambik, yang ingin konsekuen radikal, akan tetapi akibatnya situasi dalam negeri menjadi berantakan. Angola, yang memencilkan diri berdasarkan komunisme, terancam bangkrut. Mugabe rupanya menyadari bahwa kalau dia memaksakan sikap politiknya yang tak kenal kompromi, kemungkinan besar akan timbul kekacauan dan bentrokan senjata, terutama jika kepentingan-kepentingan orang kulit putih terancam. Oleh karenanya ia lebih mengutamakan perdamaian dan persatuan nasional. Dorongan semangat nasionalisme bangsa itu sendiri merupakan salah satu faktor pokok dalam perubahan sikap Mugabe.

Munculnya beberapa masalah di dalam negeri merupakan tantangan dan juga ujian bagi Pemerintah Mugabe yang baru berumur beberapa bulan itu. Sikap kompromi kiranya akan lebih menguntungkan untuk mengatasi masalah-masalah itu.

Masa depan Zimbabwe kiranya akan cerah, jika pemerintahan Mugabe tetap mempertahankan sikap dan pandangannya yang telah lebih moderat dan pragmatis itu. Dengan sistem perekonomian yang terbuka, menerima pinjaman dan investasi dari negara-negara Barat, dan dengan sumber-sumber daya alamnya yang kaya Zimbabwe dapat berkembang menjadi negara yang makmur di antara negara-negara tetangganya yang beraliran Marxis. Dan sikap toleran terhadap minoritas kulit putih mungkin akan banyak pengaruhnya terhadap bantuan negara-negara Barat dan organisasi-organisasi internasional lainnya, di mana suara negara-negara Barat masih dominan.

Salah satu hal lagi yang kiranya perlu mendapat perhatian Pemerintah Mugabe adalah Komite Sentral partainya yang berkuasa yang kabarnya memegang peranan yang lebih besar untuk mengambil keputusan-keputusan utama daripada kabinet. Jika benar, hal itu lambat laun akan banyak berpengaruh atas keutuhan kabinet koalisinya, terutama posisi anggota kabinet dari fraksi Joshua Nkomo. Namun untuk sementara masih sulit mengatakan, bagaimana sebenarnya posisi partai yang berkuasa itu dalam hubungan dengan kebijaksanaan pemerintah. Apakah ini berarti sama dengan posisi Partai Komunis Cina di RRC sebelum ada pemisahan yang jelas antara partai dengan pemerintah? Hal ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut.